**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Setelah Proklamasi 1945, Belanda belum mengakui sepenuhnya kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus 1949 - 2 September 1949 di Den Haag Belanda. Hasilnya, pihak Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia. Persetujuan tersebut baru ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 November 1949.[[1]](#footnote-2)

KMB juga menghasilkan keputusan pembentukan Uni antara RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan Kerajaan Belanda. Dengan demikian, terbentuklah Negara RI yang terdiri dari 16 negara bagian. Sebagai Kepala Negara RIS pertama terpilih Soekarno sebagai presiden, sedangkan Moh.Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri dari kabinet RIS yang pertama.[[2]](#footnote-3) Kabinet ini mengutamakan keahlian anggota-anggotanya dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan-kekuatan partai politik. Memang ada menteri yang merupakan anggota partai politik dari PNI, Masyumi dan Parkindo, tetapi mereka duduk dalam kabinet bukan sebagai wakil partai, melainkan sebagai perseorangan.[[3]](#footnote-4)

Pada saat Negara Indonesia berbentuk RIS (1949-1950), banyak rakyat Indonesia yang tidak setuju. Dalam hal ini juga menimbulkan perdebatan dikalangan tokoh-tokoh masyarakat, antara lain Drs. Moh. Hatta dengan berbagai tokoh lainnya, yaitu Mr. Supomo dan Mr. Sunario.[[4]](#footnote-5) Pihak Moh.Hatta yang tergabung dalam Kabinet Hatta, sangat mempertahankan pendapat Hatta yang menginginkan bentuk negara tetap negara serikat. Hal itu dapat dimaklumi karena Moh.Hatta-lah yang menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam KMB. Namun pihak Mr. Supomo dan Mr. Sunario tidak menyetujui bentuk negara serikat itu, dengan alasan bahwa bentuk negara serikat berbeda dengan isi proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. Disamping itu, hal tersebut sangat rawan karena di Indonesia terdapat berbagai perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Mr. Supomo dan Mr. Sunario lebih menekankan kepada bentuk negara kesatuan yang akan menjamin berlangsungnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.[[5]](#footnote-6)

Melihat kondisi Indonesia seperti itu, maka M. Natsir berpendapat bahwa yang pokok adalah pembentukan negara kesatuan, bukan apakah negara kesatuan itu tercapai dengan penggabungan negara-negara bagian ke RI atau melalui RIS. Pembentukan negara kesatuan menurut Natsir, hendaklah dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik baik antara negara-negara bagian itu maupun antara golongan masyarakat pada umumnya.[[6]](#footnote-7) Lebih lanjut Natsir mengungkapkan dengan beberapa himbauan:

Sekarang ini seluruh wakil rakyat negara bagian manapun semuanya menghendaki terwujudnya negara kesatuan, dalam hal ini tidak ada negara bagian yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Marilah negara kesatuan kita dirikan bersama dengan cara semua negara bagian termasuk juga Negara RI Jogja dibubarkan sama sekali dan marilah atas dasar hak yang sama mosi integral ini sebelum dibicarakan dalam parlemen diperiksa oleh presiden dan menteri, dan parlemen secara aklamasi menyetujuinya.[[7]](#footnote-8)

Parlemen menerima mosi diatas yang kemudian terkenal dengan sebutan Mosi Integral Natsir. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan langkah untuk membentuk negara kesatuan. Akhirnya para wakil-wakil rakyat dari Negara RIS itu satu persatu menggabungkan diri ke dalam RI, sehingga terbentuklah NKRI. Kemudian oleh Presiden Soekarno, dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1950 dinyatakan bahwa pemerintahan menggunakan sistem mekanisme kerja kembali ke NKRI. Jadi, dalam hal ini tidak lagi menggunakan sistem kerja Negara RIS atau Negara Federal. Namun dalam kenyataannya masih menggunakan landasan kerja secara konstitusional yaitu UUD RIS yang dipadu dengan UUD RI, akhirnya disebut dengan UUDS 1950. Dengan demikian, tidak sepenuhnya menggunakan UUD 1945, dimana penanggungjawab jalannya pemerintahan adalah presiden (Kabinet Presidentiil). Sedangkan dalam UUDS 1950 penanggung jawab jalannya pemerintahan masih perdana menteri (Kabinet Parlementer). Dengan berlakunya sistem mekanisme kerja NKRI itu, berarti Kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Moh.Hatta, secara otomatis bubar.[[8]](#footnote-9)

Indonesia secara resmi kembali kepada Negara Kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer pada tanggal 17 Agustus 1950. Lahirnya Mosi Integral Natsir di parlemen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah melapangkan jalan bagi peleburan Negara RIS kepada NKRI secara konstitusional. Atas jasa tersebut, presiden memberi kepercayaan terhadap Natsir untuk membentuk kabinet pertama dalam NKRI 1950 yang kemudian dikenal dengan sebutan Kabinet Natsir.[[9]](#footnote-10)

Kabinet Parlementer seperti yang ditentukan oleh UUDS 1950 hanya mungkin terbentuk dengan koalisi partai, terutama karena komposisi parlemen tidak memungkinkan pembentukan kabinet oleh satu partai saja. Sehingga kesulitan segera muncul saat mengupayakan pembentukan kabinet pertama ini.[[10]](#footnote-11)

Kesulitan pertama yang dihadapi Natsir dalam menyusun komposisi kabinet sehingga mencerminkan sebuah kabinet koalisi adalah bagaimana mengikutsertakan Partai Nasional Indonesia. Partai tersebut menolak masuk dalam Kabinet Natsir karena kedudukan atau jabatan yang ditawarkan jumlahnya dianggap terlalu sedikit. Sebagai partai terbesar kedua di parlemen saat itu, PNI menuntut untuk menduduki Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, hal ini disebabkan untuk yang pertama, bahwa jabatan Menteri Dalam Negeri sangat menentukan dalam pengangkatan gubernur dan bupati. Untuk yang kedua apabila Kementerian Pendidikan dipegang Masyumi dikhawatirkan kebijaksanaan sistem pendidikan di sekolah-sekolah negeri akan segera dipengaruhi Islam.[[11]](#footnote-12)

Mulai 6 September 1950, Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden Sukarno dan jabatan ini berakhir pada saat Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada 21 Maret 1951.[[12]](#footnote-13) Kabinet Natsir dikenal sebagai *zaken kabinet,[[13]](#footnote-14)* beranggotakan orang-orang yang berpengalaman dan sangat dihormati, mayoritas dari mereka khususnya yang menduduki pos-pos terpenting punya pandangan sosial dan politik yang sangat dekat dengan Natsir. Namun pemerintahan Kabinet Natsir ini segera memperoleh kecaman dari berbagai penjuru, termasuk dari kubu Masyumi sendiri. Sebagian kalangan Masyumi langsung menohok Natsir sebagai perdana menteri yang dinilai menyalahi keputusan kongres Desember 1949 yang melarang ketua umum partai menjadi menteri. Lebih dari itu kecaman yang keras terhadap Natsir ialah karena sikapnya yang sangat berani meninggalkan PNI.[[14]](#footnote-15)

Kabinet Natsir mengalami aneka goncangan dari Partai Nasional Indonesia di parlemen. Menurut Hatta, Soekarno mendesak Manai Sophian[[15]](#footnote-16) dan teman-temannya menjatuhkan Kabinet Natsir. “Dia memerintahkan PNI mengganggu kabinet saya sehingga tak bisa berbuat apapun,” kata Natsir kepada Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretaris Negara yang pernah menjadi staf Natsir. Dua kali anggota PNI di parlemen memboikot sidang sehingga tidak memenuhi quorum. Saat itu juga Natsir langsung mengembalikan mandatnya sebagai perdana menteri kepada Presiden Soekarno.[[16]](#footnote-17) Kabinet Natsir pada awal masa kerjanya menekankan pada pelaksanaan yang mendesak, yaitu reorganisasi dan rasionalisasi militer dan birokrasi, stabilitas di bidang keuangan dan peningkatan aktivitas ekonomi.[[17]](#footnote-18)

Masa pemerintahan Mohammad Natsir yang berusia kurang lebih satu tahun itu membawa dampak yang cukup besar bagi rakyat Indonesia, dilihat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan kabinet ini mengakibatkan perbaikan yang substansial bagi kondisi ekonomi negara. Sejak 1951 pada masa Kabinet Natsir, diusahakan menyusun Rencana Urgensi Perekonomian oleh Sumitro Djojohadikusumo dari Universitas Indonesia. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para pengusaha di Indonesia terutama di Jawa, dengan memberi kredit bagi usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan industri. Selain itu masyarakat umum pun berkesempatan mengembangkan swadaya melalui sistem perkoperasian.[[18]](#footnote-19)

Kebijakan-kebijakan perekonomian Natsir tidak luput dari kritik terutama dari lawan politiknya di PNI sayap radikal dibawah pimpinan Sidik Joyosukarto. Kelompok Sidik dalam PNI menekankan perlunya nasionalisasi industri-industri vital dan campur tangan pemerintah yang intensif terhadap perekonomian. Natsir sendiri enggan melakukan perombakan ekonomi secara gegabah, kabinetnya lebih memusatkan kebijakan pada fiskal yang stabil sebagai cara untuk mendorong pengembangan sektor swasta.[[19]](#footnote-20)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tema Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia menarik untuk diteliti. Ditengah situasi politik yang tidak menentu pada masa peralihan RIS ke RI, kebijakan Mohammad Natsir dalam memperjuangkan Irian Barat, keamanan dan ketentraman serta ekonomi nasional sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, masalah yang juga menarik untuk diteliti adalah dampak yang ditimbulkan oleh ketiga kebijakan Mohammad Natsir tersebut.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya yang mengkaji tentang *Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia (1950-1951)* maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kajian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Indonesia Pada Akhir Pemerintahan Perdana Menteri Moh. Hatta?
2. Bagaimana Proses Pengangkatan Mohammad Natsir Menjadi Perdana Menteri Di Indonesia 1950-1951?
3. Bagaimana Kebijakan Politik Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir?
4. Bagaimana Dampak Dari Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia?
5. **Batasan Masalah**

Sesuai dengan judul rencana penelitian ini, maka batasan yang menjadi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas baik secara tematis, spasial, maupun temporal sehingga mengenai arah kajian dalam penulisan penelitian ini menjadi jelas. Secara tematis penelitian ini mengkaji tentang Sejarah Politik yaitu mengenai Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia yang menjabat setelah Negara Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan.

Batasan temporal penelitian ini yaitu tahun 1950-1951, merupakan rentan waktu dimana Mohammad Natsir menjabat sebagai perdana menteri Indonesia yang hanya menjabat selama kurang lebih satu tahun. Dalam rentan waku pemerintahannya yang sangat singkat ini, Natsir memperoleh banyak kecaman-kecaman diantaranya dari kubu PNI dan dari partainya sendiri yaitu Masyumi.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Indonesia pada akhir pemerintahan Perdana Menteri Moh. Hatta.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan Mohammad Natsir menjadi perdana menteri di Indonesia 1950-1951.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir.
4. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir di Indonesia.
5. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yang membawa dampak positif bagi penulis ataupun pembaca yaitu sebagai berikut :

1. Menambah pengalaman dalam penulisan Sejarah Nasional. Khususnya mengenai sejarah awal pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk lebih memperdalam dan menambah wawasan mengenai pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir di Indonesia.
3. Memberikan pemahaman kepada generasi saat ini bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang perdana menteri.
4. Tulisan nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau pembanding terhadap penelitian yang lebih mendalam tentang Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir di Indonesia.
5. **Penelitian Relevan**

Penulisan sejarah yang mengkaji tentang seorang tokoh Mohammad Natsir sebenarnya sudah cukup banyak, ini dikarenakan, Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh yang pernah berjasa besar dalam panggung perpolitikan di Indonesia. Ada beberapa buku yang menulis tentang Mohammad Natsir, salah satunya yaitu buku Dari “Pemberontak” Menjadi Pahlawan Nasional Mohammad Natsir Dan perjuangan Politik Di Indonesia karya Waluyo. Di dalam buku ini membahas mengenai perjalanan hidup Mohammad Natsir mulai dari latar belakang kehidupannya sejak masih di Minangkabau sampai pada perjuangan politiknya antara tahun 1945 sampai dengan 1959, namun tidak membahas lebih spesifik mengenai masa pemerintahan Mohammad Natsir sebagai seorang perdana menteri. Begitupun buku yang berjudul Sejarah Tokoh Bangsa karya Yanto Basri dan Retno Suffatni yang membahas biografi Muhammad Natsir, juga tidak membahas secara spesifik mengenai kepemimpinan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri. Dan beberapa buku seperti buku Arus Perjuangan Pemuda Dari Masa Ke Masa karya Sudiyo dan buku PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis juga tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai masa pemerintahan Mohammad Natsir sebagai seorang perdana menteri.

Berdasarkan literatur yang disebutkan diatas, yang tidak memaparkan secara rinci mengenai masa pemerintahan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri Indonesia, maka penulis sangat tertarik untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia tahun 1950-1951.

1. **Metode Penelitian**
2. **Heuristik**

Penulisan sebuah karya ilmiah ataupun tulisan dalam bentuk apapun tentunya memiliki tata cara tertentu yang kemudian digunakan oleh penulis dalam membuat tulisan agar tulisan yang dibuat menjadi terstruktur dengan baik. Dalam menulis sebuah peristiwa sejarahpun sejarawan dituntut untuk mengikuti prosedur-prosedur (metode) pengkajian sebuah peristiwa sejarah dan prosedur-prosedur inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi sejarawan untuk mempertanggung jawabkan tulisannya.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa tahapan metode penulisan haruslah tersususun secara sistematis, maka tahapan pertama dari metode penulisan sejarah adalah heuristik. Heuristik (pengumpulan sumber) merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam metode sejarah.[[20]](#footnote-21) Artinya heuristik merupakan tahap awal, jadi dapat dikatakan bahwa yang menjadi aspek terpenting adalah pada tahap ini, karena apabila pada tahap ini penulis tidak menemukan sumber yang memadai maka penulis tidak dapat lanjut ketahap selanjutnya.

Sumber sejarah atau data sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.[[21]](#footnote-22) Dalam pengumpulan sumber seorang penulis haruslah berupaya untuk mendapatkan sumber yang valid dan terpercaya. Oleh karena itu diperlukan teknik atau cara yang tepat untuk mendapatkan sumber yang valid dan terpercaya. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data dilakukan dengancara penelitian pustaka.

Pengumpulan sumber sejarah dengan metode kajian kepustakaan, penulis lakukan dengan cara mengkaji beberapa sumber yang terkait kegiatan penelitian ini yakni mengumpulkan data atau fakta-fakta sejarah dengan cara mengkaji dan menelaah karya tulis, buku, majalah dan arsip yang terkait dengan adanya data tentang pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir.

Pada tahap ini, penulis sudah mengumpulkan beberapa sumber buku yang membahas mengenai Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir di Indonesia, yang penulis peroleh dari Perpustakaan Wilayah Makassar, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah UNM, Gramedia dan Toko Buku yang ada di Makassar. Antara lain buku yang berjudul Sejarah Tokoh Bangsa karya Yanto Bashri dan Retno Suffatni, buku PRRI-PERMESTA : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis karya R.Z. Leirissa, buku Sejarah Nasional Indonesia Zaman Jepang Dan Zaman Republik Indonesia karya Nugroho Notosusanto, buku Profil 143 Pahlawan Indonesia karya Tim Redaksi, buku Arus Perjuangan Pemuda Dari Masa Ke Masa karya Sudiyo, buku Pergerakan Nasional Mencapai Dan Mempertahankan Kemerdekaan karya Sudiyo, buku M. Natsir di Panggung Sejarah Republik karya Lukman Hakim, buku Api Sejarah 2 karya Ahmad Mansur Suryanegara, dan buku yang berjudul Dari “Pemberontak” Menjadi Pahlawan Nasional karya Waluyo, serta masih banyak lagi sumber buku lain, ada majalah yang penulis tidak sebutkan secara keseluruhan.

1. **Kritik Sumber**

Kritik sumber merupakan tahap selanjutnya setelah heuristik dari metode penulisan sejarah. Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan autentisitas dan kredibilitas dari sebuah sumber sejarah yang telah didapatkan sebelumnya. Seluruh sumber sejarah yang didapatkan di verifikasi karena tidak semua sumber sejarah yang didapatkan penulis bisa digunakan.

Kritik sumber pada umumnya dilakukan pada sumber-sumber pertama. Kritik tersebut menyangkut verifikasi sumber, dimana penulis menguji kebenaran atau ketepatan dari sumber tersebut dan ada dua jenis kritik yang dikenal dalam metode sejarah yaitu kritik eksternal dan internal.[[22]](#footnote-23) Kritik eksternal dilakukan dalam rangka menguji keautentikan suatu sumber dengan jalan meneliti tulisan, gaya bahasa dan sebagainya guna mengetahui apakah sumber itu asli atau turunan, sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji keabsahan sumber yakni apakah sumber tersebut layak dan dapat dipercaya.

Kritik internal dilakukan untuk meneliti sumber-sumber yang berkaitan dengan sumber masalah penelitian dan penulisan ini. Tahap ini menjadi ukuran sejauh mana objektifitas penulis mengelaborasi segenap data atau sumber yang diperolehnya. Pada tahap ini sesungguhnya kita dapat mengukur keabsahan suatu sumber yang kemudian akan dikonfirmasikan dengan sumber yang satu dengan yang lainnya yang tentunya dengan masalah yang sama. Hasil dari kritik sejarah tersebut, baik kritik ekstern maupaun intern diharapakan data yang akurat dan kredibel yang kemudian menjadi fakta sejarah.

Pada tahap kritik sumber ini, untuk menguji keabsahan suatu sumber, penulis telah melakukan kritik sumber terhadap beberapa buku seperti buku yang berjudul Api Sejarah 2 karya Ahmad Mansur Suryanegara. Di dalam buku ini, yaitu pada halaman 327 mengatakan bahwa setelah terbentuknya NKRI, Gubernur Atjeh Daud Beureueh menuntut otonomi daerah yang berdiri sendiri, 1 September 1951 kepada Perdana Menteri Mohammad Natsir. Yang penulis kritik pada isi buku diatas yaitu mengenai tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan. Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir di Indonesia dimulai dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, data ini penulis peroleh dari beberapa sumber buku dan internet. Jadi, tidak mungkin M. Natsir masih menjabat sebagai Perdana Menteri pada tanggal 1 September 1951 seperti yang penulis temukan di buku Api Sejarah 2 tersebut.

1. **Interpretasi**

Tahap selanjutnya setelah kritik sumber yaitu tahap interpretasi, pada tahap ini penulis dituntut untuk melakukan rekontruksi peristiwa sejarah berdasarkan sumber yang telah diperoleh melalui tahap kritik sumber. Pada tahap ini menuntut kecermatan dan obyektifitas penulis untuk menghindari interpretasi yang bersifat subyektif terhadap sebuah fakta sejarah. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengetahui watak-watak peradaban atau dengan kata lain kondisi umum yang sebenarnya dan menggunakan nalar yang kritis. Dalam proses interpretasi kadang penulis akan mendapatkan fakta-fakta yang berbeda dari sebuah peristiwa, pada kondisi inilah yang kemudian seorang penulis membutuhkan kecermatan dan sikap obyektifitas dalam menentukan fakta sejarah yang tidak bersifat subyektif.

1. **Historiografi**

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis akan menuliskan peristiwa sejarah tersebut dalam sebuah tulisan yang dalam penulisan, pemaparan dan pelaporan menggunakan tata cara tertentu. Dimana dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dengan kajian kepustakaan. Sebagaimana dengan laporan karya penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan). Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan didapat nilai apakah penelitian itu berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakan ataukah tidak, apakah sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulan memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai ataukah tidak dan sebagainya.

Sehingga, penulisan tersebut dapat dikatakan menentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri. Dalam konteks ini sejarawan tidak hanya menjawab pertanyaan “apa”, “siapa”, “kapan”, dan “bagaimana” tetapi melakukan suatu eksplanasi secara kritis tentang “bagaimana”, dan “mengapa”.[[23]](#footnote-24) Pada tahap ini fakta-fakta yang telah didapatkan penulis setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Berupa sebuah kisah sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis itu sendiri.

Penulisan sejarah merupakan kajian mendalam tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi, dalam hal ini penulisan sejarah Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia Tahun 1950-1951. Penulis akan menuliskan bagaimana kondisi Indonesia sebelum Mohammad Natsir memerintah yaitu pada masa pemerintahan Perdana Menteri Moh. Hatta dan bagaimana proses pengangkatan Perdana Menteri Mohammad Natsir itu sendiri serta dampak apa yang ditimbulkan.

Tulisan ini mengarah pada kajian sejarah politik. Dimana fokus kajiannya berisi tentang rentetan kejadian-kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani), dan interaksi antara kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan.[[24]](#footnote-25) Penulisan yang mengacu pada historiografi konvensional atau mengenai penulisan sejarah orang-orang yang berpegaruh besar dalam perubahan masyarakat.

1. Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 123. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sudiyo, *Arus Perjuangan Pemuda dari Masa Ke Masa*, (Jakarta : Bina Adiaksara, 2003), hlm. 154. [↑](#footnote-ref-3)
3. Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm. 314. [↑](#footnote-ref-4)
4. Mr. Supomo adalah salah seorang peletak dasar Negara RI. Ia terlibat langsung dalam penyusunan UUD 1945, konstitusi RIS dan UUDS 1950. Supomo juga dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Gajah Mada, ia juga pernah menjadi Rektor Universitas Indonesia (17 Maret 1951-15 April 1954). Sedangkan Mr. Sunario adalah salah satu tokoh Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjabat sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Sunario menjadi anggota dan kemudian Badan Pekerja KNIP, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (1953-1955). [↑](#footnote-ref-5)
5. Sudiyo, *Op.Cit,* hlm. 125. [↑](#footnote-ref-6)
6. Waluyo, *Dari “Pemberontak” Menjadi Pahlawan Nasional : Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : Ombak, 2009), hlm. 77. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-8)
8. Sudiyo, *Op.Cit,* hlm. 155. [↑](#footnote-ref-9)
9. Waluyo, *Op.Cit,* hlm. 79. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-12)
12. Tim Redaksi, *Profil 143 Pahlawan Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Timur, 2009), hlm. 80. [↑](#footnote-ref-13)
13. Zaken kabinet adalah kabinet yang dianggotai oleh menteri-menteri yang ahli di bidangnya. [↑](#footnote-ref-14)
14. Waluyo, *Op.Cit,* hlm. 84. [↑](#footnote-ref-15)
15. Manai Sophian adalah seorang kader PNI yang menjabat sebagai Sekretaris Jendral PNI pada tahun 1950-an sampai tahun 1964. Ia merupakan pejuang bergaris ideologi nasionalis-Soekarnois yang lahir di Takalar pada tanggal 5 Sepetember 1915. [↑](#footnote-ref-16)
16. http://siapakah.wordpress.com/2008/07/17, *Natsir : Bung Besar dan Menteri Kesayangan*, diakses pada tanggal 14 Agustus 2014. [↑](#footnote-ref-17)
17. Waluyo, *Op.Cit*. hlm. 86. [↑](#footnote-ref-18)
18. R.Z. Leirissa, *PRRI-PERMESTA Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-19)
19. Waluyo, *Op.Cit,* hlm. 87. [↑](#footnote-ref-20)
20. Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah,* (Makassar : Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar, 2007), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-21)
21. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Bentang Pustaka, 1995), hlm. 95. [↑](#footnote-ref-22)
22. Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* , (Yogyakarta : Ombak, 2007), hlm. 132. [↑](#footnote-ref-23)
23. Saleh Madjid, *Op.Cit,* hlm. 36. [↑](#footnote-ref-24)
24. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 174. [↑](#footnote-ref-25)